



BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan kegiatan untuk menjamin kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran, sehingga tercapai tujuan pembangunan Daerah yang berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Purworejo, diperlukan perencanaan secara holistik, integratif, spasial dan tematik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman perencanaan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Purworejo Tahun 2026, diperlukan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada 1 Januari 2026 dan berakhir pada 31 Desember 2026.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Renja PD Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada 1 Januari 2026 dan berakhir pada 31 Desember 2026.

Pasal 2

- (1) Dokumen Renja PD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
- (2) Dokumen Renja PD Tahun 2026 disusun berpedoman kepada rancangan rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan RKPD Tahun 2026.

Pasal 3

- (1) Renja PD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I : pendahuluan;
 - b. bab II : hasil evaluasi rencana kerja perangkat daerah tahun lalu;
 - c. bab III : tujuan dan sasaran perangkat daerah;
 - d. bab IV : rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah; dan
 - e. bab V : penutup.
- (2) Dokumen Renja PD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

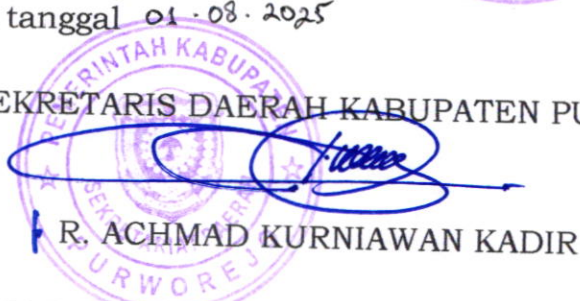
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 01 Agustus 2025



Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 01.08.2025

P.j SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO



BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2025 NOMOR 22 SERI E NOMOR 19

LAMPIRAN XVII
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap perangkat daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Renja adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Proses penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2026 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2026 dan berpedoman pada Rancangan Akhir Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2025-2029.

Renja disusun dengan melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting perangkat daerah, evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra. Renja akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2026 adalah :

1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dalam Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 21 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 124 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo (Seri D Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 137 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 137 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2026 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan

dalam penentuan program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran secara berkesinambungan. Sedangkan tujuan penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 ke dalam rencana program dan kegiatan Tahun 2026.
2. Menyelaraskan rencana strategis kabupaten dengan pelayanan Perangkat Daerah, usulan masyarakat, dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi rencana strategis Perangkat Daerah.
3. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam rangka pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi uraian mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Berisi uraian mengenai evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah; Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah; Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; Review terhadap rancangan awal RKPD dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi uraian mengenai telaahan terhadap kebijakan nasional; tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah; dan program dan kegiatan.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi uraian mengenai rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah

BAB V : PENUTUP

Berisi uraian mengenai catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Renja dilaksanakan dalam rangka mereview dan mengidentifikasi realisasi capaian kinerja program dan kegiatan serta permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam rangka pencapaian target kinerja. Capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Tidak ada realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut:
 - a. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
 - Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
Indikator kinerja : Tersusunnya Dokumen Ketersediaan Pangan
Target kinerja : 1 Dokumen
Capaian kinerja : 1 Dokumen (100%)
 - Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per kapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
Indikator kinerja : Terlaksananya Pemberdayaan Dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang
Target kinerja : 5 Kelompok
Capaian indikator : 5 Kelompok (100%)
 - b. Program Penanganan Kerawanan Pangan
 - Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota
Indikator kinerja : Tertanganinya Kerawanan Pangan
Target kinerja : 1 Dokumen
Capaian kinerja : 1 Dokumen (100%)
 - c. Program Pengawasan Keamanan Pangan
Indikator kinerja : Persentase Pangan Segar Aman
Target kinerja : 100%
Capaian kinerja : 100% (100%)
 - Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota
Indikator kinerja : Tersedianya Data Pengawasan Pangan Segar
Target kinerja : 1 Dokumen
Capaian kinerja : 1 Dokumen (100%)
 - d. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
Indikator kinerja : Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Target kinerja : 100%
Capaian kinerja : 100% (100%)
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Indikator kinerja : Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 Target kinerja : 3 Dokumen
 Capaian kinerja : 3 Dokumen (100%)
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 Indikator kinerja : Terlayannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 Target kinerja : 100%
 Capaian kinerja : 100% (100%)
 - Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 Indikator kinerja : Terlayannya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 Target kinerja : 100%
 Capaian kinerja : 100% (100%)
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Indikator kinerja : Terlayannya Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Target kinerja : 100%
 Capaian kinerja : 100% (100%)
 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 Indikator kinerja : Pengadaan Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 Target kinerja : 3 Unit
 Capaian kinerja : 3 Unit (100%)
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Indikator kinerja : Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Target kinerja : 3 Laporan
 Capaian kinerja : 3 Laporan (100%)
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Indikator kinerja : Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Target kinerja : 5 Jenis
 Capaian kinerja : 5 Jenis (100%)
- e. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
 Indikator kinerja : Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
 Target kinerja : 1 Dokumen
 Capaian kinerja : 1 Dokumen (100%)
 - Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme kewenangan Kabupaten/ Kota
 Indikator kinerja : Terkelolanya Sumber Daya Genetik (SDG)
 Target kinerja : 1 Dokumen
 Capaian kinerja : 1 Dokumen (100%)
 - Kegiatan Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Lain

- Indikator kinerja : Terlaksananya Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Lainnya
 Target kinerja : 1 Dokumen
 Capaian kinerja : 1 Dokumen (100%)
- f. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian
 Indikator kinerja : Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pertanian
 Target kinerja : 1 Dokumen
 Capaian kinerja : 1 Dokumen (100%)
 - Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian
 Indikator kinerja : Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian
 Target kinerja : 1 Dokumen
 Capaian kinerja : 1 Dokumen (100%)
 - Kegiatan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota
 Indikator kinerja : Terlaksananya Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Kambing Kaligesing
 Target kinerja : 12 Bulan
 Capaian kinerja : 12 Bulan (100%)
- g. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota
 Indikator kinerja : Terkelolanya Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner
 Target kinerja : 1 Dokumen
 Capaian kinerja : 1 Dokumen (100%)
 - Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
 Indikator kinerja : Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
 Target kinerja : 1 Dokumen
 Capaian kinerja : 1 Dokumen (100%)
- h. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
 Indikator kinerja : Persentase Fasilitasi Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT
 Target kinerja : 100%
 Capaian kinerja : 100% (100%)
- Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota
 Indikator kinerja : Terlaksananya Pengendalian OPT
 Target kinerja : 16 Kecamatan
 Capaian kinerja : 16 Kecamatan (100%)
- i. Program Penyuluhan Pertanian
- Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
 Indikator kinerja : Terlaksananya Penyuluhan Pertanian
 Target kinerja : 16 Kecamatan
 Capaian kinerja : 16 Kecamatan
3. Realisasi program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan
- a. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

- Indikator kinerja : Persentase Ketersediaan Pangan Utama
- Target kinerja : 100%
- Capaian kinerja : 286,64% (286,64%)
- b. Program Penanganan Kerawanan Pangan
 - Indikator kinerja : Persentase Penanganan pada Daerah Rawan/Rentan Pangan
 - Target kinerja : 20%
 - Capaian kinerja : 21,13% (105,65%)
- c. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
 - Indikator kinerja : Persentase Penyediaan Sarana Pertanian bagi Kelompok Tani
 - Target kinerja : 90%
 - Capaian kinerja : 143,03% (102,4%)
- d. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - Indikator kinerja : Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian bagi Kelompok Tani
 - Target kinerja : 60%
 - Capaian kinerja : 81,85% (136,42%)
- e. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - Indikator kinerja : Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular
 - Target kinerja : 16%
 - Capaian kinerja : 16,14% (100,88%)
- f. Program Penyuluhan Pertanian
 - Indikator kinerja : Persentase Kenaikan Jumlah Petani Milenial
 - Target kinerja : 60%
 - Capaian kinerja : 80% (133,33%)

Capaian Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo sampai dengan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi indikator kinerja program yang belum mencapai target Renstra:
 - a. Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
 - Indikator kinerja : Persentase Infrastruktur yang Disediakan
 - Target kinerja : 100%
 - Capaian kinerja : 60% (60,00%)
 - b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - Indikator kinerja : Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian bagi Kelompok Tani
 - Target kinerja : 100%
 - Capaian kinerja : 81,85% (81,85%)
 - c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - Indikator kinerja : Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular
 - Target kinerja : 23%
 - Capaian kinerja : 16,14% (70,17%)
 - d. Program Penyuluhan Pertanian
 - Indikator kinerja : Persentase Kenaikan Jumlah Petani Milenial
 - Target kinerja : 100%
 - Capaian kinerja : 80% (80,00%)

2. Realisasi indikator kinerja program yang sudah mencapai target Renstra:
 - a. Program Pengawasan Keamanan Pangan
Indikator kinerja : Persentase Pangan Segar Aman
Target kinerja : 100%
Capaian kinerja : 100% (100,00%)
 - b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
Indikator kinerja : Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Target kinerja : 100%
Capaian kinerja : 100% (100,00%)
 - c. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
Indikator kinerja : Persentase Fasilitas Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT
Target kinerja : 100%
Capaian kinerja : 100% (100,00%)
 - d. Program Perizinan Usaha Pertanian
Indikator kinerja : Persentase Jumlah Usulan Izin Usaha Pertanian
Target kinerja : 100%
Capaian kinerja : 100% (100,00%)
3. Realisasi indikator kinerja program yang sudah melebihi target Renstra:
 - a. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Indikator kinerja : Persentase Ketersediaan Pangan Utama
Target kinerja : 100%
Capaian kinerja : 286,64% (286,64%)
 - b. Program Penanganan Kerawanan Pangan
Indikator kinerja : Persentase Penanganan pada Daerah Rawan/ Rentan Pangan
Target kinerja : 19,72%
Capaian kinerja : 21,13% (107,15%)
 - c. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
Indikator kinerja : Persentase Penyediaan Sarana Pertanian bagi Kelompok Tani
Target kinerja : 100%
Capaian kinerja : 143,03% (143,03%)

Faktor yang menjadi penyebab tercapainya target kinerja hasil/ keluaran yang sudah direncanakan adalah sebagai berikut:

1. Teknologi intensifikasi pertanian yang semakin berkembang.
2. Kabupaten Purworejo mempunyai lahan pertanian cukup luas sehingga produksi padi cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduk Kabupaten Purworejo.
3. Petani milenial lebih adaptif dan lebih mudah dalam menerapkan teknologi baru.
4. Adanya upaya pengendalian hama dan penyakit pertanian.
5. Adanya kampanye konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman yang mempengaruhi tingkat konsumsi pangan masyarakat.
6. Teknologi membantu mengolah makanan secara kreatif, variatif dan inovatif.

Faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya target kinerja hasil/ keluaran yang sudah direncanakan adalah sebagai berikut:

1. Anomali iklim yang tidak bisa diprediksi sehingga mengubah musim tanam yang akan mempengaruhi produksi.
2. Ancaman serangan hama dan penyakit pertanian.
3. Ancaman alih fungsi lahan pertanian.
4. Keterbatasan tenaga kerja di sektor pertanian dalam mengadopsi teknologi.
5. Mayoritas masyarakat (usia muda) cenderung mengkonsumsi makanan instan/ siap saji.
6. Kurangnya ketersediaan pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman di tingkat rumah tangga (khususnya pangan hewani).
7. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman.
8. Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan pangan lokal.
9. Karakteristik masyarakat pedesaan Kabupaten Purworejo yang kurang memperhatikan keberagaman konsumsi pangan.

Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kinerja adalah sebagai berikut:

1. Pendampingan dan pembinaan kepada petani untuk peningkatan produksi, termasuk masa tanam yang tepat menyesuaikan musim.
2. Melaksanakan pertanian ramah lingkungan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca.
3. Melaksanakan gerakan pengendalian dan pencegahan serangan hama penyakit tanaman.
4. Melaksanakan layanan kesehatan hewan dalam rangka pencegahan dan penanganan penyakit hewan menular.
5. Pemanfaatan lahan pertanian secara optimal, menghindari lahan bero.
6. Meningkatkan kolaborasi dengan perangkat daerah lain untuk mendorong konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.
7. Sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan guna menunjang peningkatan pencapaian kinerja program, sasaran dan tujuan.

Tabel. 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=10/4
2.09.	Urusan Pangan									
2 09 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Infrastruktur yang Disediakan (%)	100	60	0	0	#DIV/0!	80	100	100,00
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit)	5	3	0	0	#DIV/0!	2	5	100,00
	Penyediaan infrastruktur lumbung pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia (Unit)	2	2	0	0	#DIV/0!	0	2	100,00
2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastuktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang tersedia (Unit)	3	1	0	0	#DIV/0!	2	3	100,00
2 09 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Pangan Utama (%)	100	326	100	286,64	286,64	287,16	287,16	287,16

2 09 03 2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Dokumen Ketersediaan Pangan yang disusun (Dokumen)	1	1	1	1	100,00	1	3	300,00
	Penyediaan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan (Laporan)	2	2	0	0	#DIV/0!	0	2	100,00
2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Laporan)	2	2	1	1	100,00	1	4	200,00
2.09.03.2.01.0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan (Unit)	5	0	0	0	#DIV/0!	0	0	-
2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan *	Informasi Harga dan Pasokan Pangan (Dokumen)	0	0	1	1	100,00	1	2	#DIV/0!
2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	5	0	1	1	100,00	1	2	40,00
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Laporan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota yang Disusun (Laporan)	0	0	0	0	#DIV/0!	1	1	#DIV/0!

2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Ton)	0	0	0	0	#DIV/0!	40	40	#DIV/0!
2 09 03 2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang yang Dilaksanakan (Kelompok)	5	5	5	5	100,00	5	5	100,00
2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)	2	2	1	1	100,00	0	3	150,00
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	2	2	1	1	100,00	1	4	200,00
2 09 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan pada Daerah Rawan/ Rentan Pangan (%)	19,72	19,72	20	21,13	105,65	21,83	21,83	110,70
2 09 04 2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Tersedia (Dokumen)	1	0	0	0	#DIV/0!	1	1	100,00
2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan (Dokumen)	1	1	0	0	#DIV/0!	0	1	100,00

2 09 04 2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kerawanan Pangan yang Ditangani (Desa)	1	1	1	1	100,00	1	3	300,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/ Kota (Laporan)	2	2	1	1	100,00	0	3	150,00
2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/ kota (Laporan)	5	0	1	1	100,00	1	2	40,00
2 09 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Aman (%)	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
2 09 05 2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	Data Pengawasan Pangan Segar yang Disediakan (Dokumen)	1	1	1	1	100,00	1	3	300,00
2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota (Dokumen)	2	2	1	1	100,00	1	4	200,00
2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota (Dokumen)	5	0	1	1	100,00	1	2	40,00

2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Dokumen Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (Dokumen)	5	0	1	1	100,00	1	2	40,00
	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota yang Dibina (Dokumen)	2	2	0	0	#DIV/0!	0	2	100,00
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota (Dokumen)	2	2	0	0	#DIV/0!	0	2	100,00
2 09 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten (%)	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
2 09 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	23	7	3	3	100,00	3	13	56,52
2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	75	31	19	19	100,00	19	69	92,00

2.09.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	1	0	0	#DIV/0!	0	1	50,00
2.09.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2	1	0	0	#DIV/0!	0	1	50,00
2.09.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	1	0	0	#DIV/0!	0	1	50,00
2.09.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	1	0	0	#DIV/0!	0	1	50,00
2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	80	32	16	16	100,00	0	48	60,00

2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	30	15	6	6	100,00	22	43	143,33
2 09 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ bulan)	788	141	182	178	97,80	183	502	63,71
2.09.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	30	12	6	6	100,00	6	24	80,00
2.09.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	130	52	26	26	100,00	26	104	80,00

2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah (%)	100	100	0	0	#DIV/0!	0	100	100,00
2.09.01.2.03 0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5	2	0	0	#DIV/0!	0	2	40,00
2 09 01 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah (%)	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
2.09.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	5	2	1	1	100,00	1	4	80,00
2 09 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
2.09.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	5	2	0	0	#DIV/0!	1	3	60,00
2.09.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	5	9	0	0	#DIV/0!	0	9	180,00

2.09.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	400	100	0	0	#DIV/0!	0	100	25,00
2.09.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	200	0	0	0	#DIV/0!	0	0	-
2 09 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
2 09 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	20	8	4	4	100,00	1	13	65,00
2 09 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	10	5	2	2	100,00	1	8	80,00
2 09 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	60	24	12	12	100,00	12	48	80,00
2 09 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	60	24	12	12	100,00	0	36	60,00

2 09 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	10	4	0	0	#DIV/0!	0	4	40,00
2 09 01 2.06 0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan (Paket)	20	8	4	4	100,00	1	13	65,00
2 09 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	60	36	12	12	100,00	6	54	90,00
2 09 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60	36	12	12	100,00	12	60	100,00
2 09 01 2.06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	20	12	4	4	100,00	1	17	85,00
2 09 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan (Unit)	4	0	3	3	100,00	0	3	75,00
2 09 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	0	0	0	#DIV/0!	0	0	-

2 09 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (unit)	1	0	0	0	#DIV/0!	0	0	-
2 09 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	0	3	3	100,00	0	3	300,00
2 09 01 2.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	1	0	0	0	#DIV/0!	0	0	-
2 09 01 2.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	0	0	0	#DIV/0!	0	0	-
2 09 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan (Bulan)	60	36	12	12	100,00	12	60	100,00
2 09 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	0	0	0	#DIV/0!	0	0	-
2 09 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (unit)	60	36	12	12	100,00	12	60	100,00

2 09 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60	36	12	12	100,00	12	60	100,00
2 09 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara (Bulan)	60	36	12	12	100,00	12	60	100,00
2 09 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	0	0	0	#DIV/0!	1	1	#DIV/0!
2 09 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	393	48	18	18	100,00	31	97	24,68
2 09 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	16	16	17	17	100,00	24	57	356,25
2 09 01 2.09 0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1	1	1	1	100,00	1	3	300,00

2 09 01 2.09 0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	8	14	9	9	100,00	14	37	462,50
2 09 01 2.09 0012	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/ Rehabilitasi (ha)	0,096	0,096	0,096	0,096	100,00	0,0716	0,0716	74,58
3 27	Urusan Pertanian									
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan Sarana Pertanian bagi Kelompok Tani (%)	100	89,7	90	143,03	158,92	143,23	143,23	143,23
3 27 02 2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian yang Dilaksanakan (Dokumen)	5	3	1	1	100,00	1	5	100,00
3 27 02 2.01 0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	1	1	1	1	100,00	1	3	300,00
3 27 02 2.01 0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	1	1	1	1	100,00	1	3	300,00

3 27 02 2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Sumber Daya Genetik (SDG) yang dikelola (Dokumen)	3	3	1	1	100,00	1	5	166,67
	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah SDG Hewan/ Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian (VUB)	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
3 27 02 2.02 0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman (Dokumen)	1	1	1	1	100,00	1	3	300,00
3 27 02 2.02 0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah SDG Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian (VUB)	1	0	1	1	100,00	2	3	300,00
3 27 02 2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam daerah kabupaten/ Kota	Rekomendasi Sertifikat Layak Bibit Ternak yang Disediakan (Dokumen)	1	0	0	0	#DIV/0!	0	0	-
3 27 02 2.05 0008	Penjaminan Peredaran Benih/ Bibit Ternak	Jumlah Benih/ Bibit Ternak yang Beredar (Ekor)	150	0	0	0	#DIV/0!	0	0	-
3 27 02 2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Lain yang Dilaksanakan (Dokumen)	1	1	1	1	100,00	1	3	300,00

	Pengadaan Benih/ Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Benih/ Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain (Ekor)	405	1295	0	0	#DIV/0!	0	1295	319,75
3 27 02 2.06 0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Jumlah Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain (Ekor)	2489	1295	977	1128	115,46	879	3302	132,66
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian bagi Kelompok Tani (%)	100	54,07	60	81,85	136,42	82,22	82,22	82,22
3 27 03 2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian yang Dilaksanakan (Dokumen)	2	1	1	1	100,00	0	2	100,00
3 27 03 2.01 0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Dokumen)	0	0	1	1	100,00	0	1	#DIV/0!
	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan (Dokumen)	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!

3 27 03 2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian yang Dilaksanakan (Dokumen)	3	78	1	1	100,00	1	80	2.666,67
3 27 03 2.02 0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	30	50	56	56	100,00	50	156	520,00
3 27 03 2.02 0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
3 27 03 2.02 0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	17	0	2	2	100,00	0	2	11,76
3 27 03 2.02 0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara serta Beroperasi (Unit)	3	0	2	2	100,00	0	2	66,67
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara (Unit)	23	28	17	17	100,00	0	45	195,65
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	1	0	0	0	#DIV/0!	0	0	-

3 27 03 2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Wilayah Sumber Bibit Kambing Kaligesing yang Dikelola (Bulan)	12	12	12	12	100,00	12	36	300,00
3 27 03 2.03 0002	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak (Laporan)	1	1	1	1	100,00	1	3	300,00
3 27 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (%)	23	16,25	16	16,14	100,88	19	19	82,61
3 27 04 2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan menular dalam daerah kabupaten/ kota	Layanan Pengendalian Penyakit Hewan Menular yang Dilaksanakan (Kecamatan)	16	0	0	0	#DIV/0!	0	0	-
	Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis (Laporan)	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
3 27 04 2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/ Kota	Laporan Hasil Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan (Dokumen)	1	1	0	0	#DIV/0!	0	1	100,00

	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/ atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/ atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	1	1	0	0	#DIV/0!	0	1	100,00
3 27 04 2.01 0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/ atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)						#VALUE!		#VALUE!	#VALUE!
3 27 04 2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner yang Dikelola (Dokumen)	3	16	1	1	100,00	1	18	600,00
3 27 04 2.03 0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium *	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium (Laporan)	0	0	1	1	100,00	0	1	#DIV/0!
3 27 04 2.03 0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	1	1	1	1	100,00	1	3	300,00
3 27 04 2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner yang Dilaksanakan (Dokumen)	8	2	1	1	100,00	1	4	50,00

3 27 04 2.04 0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	1	2	1	1	100,00	1	4	400,00
3 27 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Fasilitasi Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (%)	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
3 27 05 2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang Dilaksanakan (Laporan)	3	16	1	1	100,00	1	18	600,00
3 27 05 2.01 0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (ha)	5693	710	450	752	167,11	300	1762	30,95
3 27 06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Jumlah Usulan Izin Usaha Pertanian (%)	100	100	100	100	100,00	100	100	100,00
3 27 06 2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Fasilitasi Rekomendasi Perizinan Usaha Pertanian yang Dilaksanakan (Dokumen)	1	1	0	0	#DIV/0!	1	2	200,00
3 27 06 2.01 0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi (Laporan)	1	1	0	0	#DIV/0!	1	2	200,00

3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kenaikan Jumlah Petani Milenial (%)	100	60	60	80	133,33	80	80	80,00
3 27 07 2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Penyuluhan Pertanian yang Dilaksanakan (Kecamatan)	16	16	16	16	100,00	16	16	100,00
3 27 07 2.01 0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	16	16	16	16	100,00	16	16	100,00
3 27 07 2.01 0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (unit)	2500	2500	2512	2512	100,00	2500	2500	100,00
3 27 07 2.01 0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	45	30	5	5	100,00	5	40	88,89
3 27 07 2.01 0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk (Unit)	0	0	0	0	#DIV/0!	1	1	#DIV/0!
	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk (Unit)	1	1	0	0	#DIV/0!	0	1	100,00

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah adalah proses mengevaluasi pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik yang dilakukan oleh perangkat daerah, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas operasional perangkat daerah

1. Skor Pola Pangan Harapan

Salah satu indikator yang digunakan dalam menilai kualitas konsumsi pangan adalah Pola Pangan Harapan (PPH). PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan aspek daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya, dan agama. Adapun kelompok pangan tersebut mencakup: (1) padi-padian, (2) umbi-umbian, (3) pangan hewani, (4) minyak dan lemak, (5) buah/biji berminyak, (6) kacang-kacangan, (7) gula, (8) sayur dan buah, serta (9) lain-lain. Kualitas konsumsi pangan penduduk dapat dicerminkan dari besaran skor pola pangan harapan. Skor PPH maksimal adalah 100. Semakin tinggi skor PPH, maka konsumsi pangan penduduk semakin beragam dan bergizi seimbang.

Target indikator skor Pola Pangan Harapan Tahun 2024 sebesar 89,77 sudah realisasi sebesar 90,42 sehingga capaian kinerja 100,72%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat kabupaten Purworejo sudah mulai menyadari akan pentingnya konsumsi makanan yang beragam dan seimbang, hanya saja masih perlu ditingkatkan untuk konsumsi protein hewani.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif untuk membandingkan antara harapan masyarakat dan kondisi pelayanan dengan mengacu pada pendapat masyarakat. Pelaksanaan survei IKM Tahun 2024 dilaksanakan 2 (dua) kali dalam satu tahun untuk pelayanan UPT Puskesmas.

Capaian indikator sasaran strategis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah Tahun 2024 sebesar 88,66 dari target 81 sehingga capaian kinerja sebesar 109,46%. Dari 9 unsur pelayanan yang disurvei, unsur Biaya/ Tarif; unsur Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan; unsur Perilaku Pelaksana mendapatkan nilai tertinggi, sedangkan unsur Waktu Pelayanan, unsur Produk Layanan, unsur Sarana dan Prasarana mendapatkan nilai terendah.

Hal ini sesuai dengan kondisi yang tersedia di UPT Puskesmas, dimana saat ini baru tersedia 4 (empat) Puskesmas untuk melayani masyarakat, yaitu Puskesmas Mranti, Puskesmas Kaligesing, Puskesmas Purwodadi dan Puskesmas Kutoarjo, sehingga masih belum mampu memberikan pelayanan yang maksimal ke seluruh wilayah Kabupaten Purworejo yang berjumlah 16 Kecamatan. Selain itu UPT Puskesmas juga baru bisa memberikan pelayanan rawat jalan untuk pasien dengan kasus yang ringan karena belum memiliki sarana pendukung untuk rawat inap, sedangkan kasus berat yang membutuhkan tindakan pembedahan belum tersedia sarana dan prasarana pendukungnya.

3. Produktivitas Pertanian

Indikator produktivitas pertanian dihitung dari produktivitas padi sawah. Pada Tahun 2024 realisasi sebesar 7,05 ton/ha dari target sebesar 6,8 ton/ha sehingga capaian kinerjanya sebesar 103,69%. Hal

ini didukung dengan adanya upaya peningkatan sarana dan prasarana pertanian, pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) serta peningkatan kapasitas petani melalui kegiatan penyuluhan.

4. Ketersediaan Pangan Utama

Ketersediaan pangan utama dihitung dari produksi beras Kabupaten Purworejo dibagi dengan jumlah penduduk. Produksi beras dihitung dari konversi produksi padi sawah dan ladang. Capaian indikator sasaran strategis ketersediaan pangan utama tahun 2024 sebesar 254,54 kg/ kapita dari target 250 kg/ kapita. Hal ini didukung karena kabupaten Purworejo mempunyai kawasan pertanian yang cukup luas dengan penduduknya yang sebagian besar mempunyai mata pencaharian sebagai petani. Adanya kegiatan Perluasan Areal Tanam (PAT) dari Kementerian Pertanian yang bertujuan untuk memperluas lahan pertanian khususnya padi turut memperkuat produksi sektor tanaman pangan.

5. Persentase Kenaikan Produksi Pertanian

Capaian indikator sasaran strategis persentase kenaikan produksi pertanian tahun 2024 sebesar 1,28% dari target 1,25%. Produksi pertanian secara umum didukung oleh produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakan. Kenaikan produksi pertanian didominasi oleh kenaikan sektor peternakan sebesar 6,72%, sementara sektor perkebunan mengalami penurunan signifikan sebesar 21,98%, utamanya di komoditas kelapa. Fenomena el nino yang terjadi pada tahun 2024 menyebabkan tanaman kelapa kekurangan air sehingga bunga atau bakal buah menjadi rontok. Buah kelapa yang bisa bertahan hingga panen pun bobotnya tidak maksimal. Kekurangan air berdampak pada kegagalan penyerapan nutrisi dari dalam tanah oleh akar kelapa.

6. Persentase Infrastruktur yang Disediakan

Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan dengan indikator Persentase Infrastruktur yang Disediakan. Persentase infrastruktur yang dimaksud adalah penyediaan lumbung pangan masyarakat, dengan target pembangunan 1 unit lumbung setiap tahun periode renstra, sehingga pada akhir periode renstra sudah ada lumbung sebanyak 5 unit. Untuk tahun 2024 target lumbung yang sudah dibangun sebanyak 3 unit dan sudah tersedia 3 unit, sehingga capaian kinerjanya 100,00%. Lumbung pangan masyarakat yang sudah disediakan ada di Desa Keburuhan Kecamatan Ngombol, Desa Kendalrejo Kecamatan Pituruh dan Desa Semawung Kecamatan Purworejo.

7. Persentase Ketersediaan Pangan Utama

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan indikator Persentase Ketersediaan Pangan Utama. Indikator ini dihitung dengan jumlah ketersediaan pangan utama (beras) perkapita pada tahun n / jumlah kebutuhan pangan utama (beras) perkapita pada tahun $n \times 100\%$. Indikator persentase ketersediaan pangan utama Tahun 2024 mempunyai target sebesar 100% dan sudah realisasi sebesar 286,64%, sehingga capaian kinerjanya 286,64%. Program ini didukung oleh 2 kegiatan dan 5 sub kegiatan.

8. Persentase Penanganan pada Daerah Rawan/ Rentan Pangan

Program Penanganan Kerawanan Pangan dengan indikator Persentase Penanganan pada Daerah Rawan/ Rentan Pangan. Indikator ini mempunyai target sebesar 20%, realisasi sebesar 21,13%, sehingga capaian kinerjanya sebesar 105,63%. Program ini didukung oleh 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan. Jumlah desa rentan atau rawan pangan

yang ditangani sebanyak 30 desa dari 142 desa rentan atau rawan pangan.

9. Persentase Pangan Segar Aman

Program Pengawasan Keamanan Pangan dengan indikator Persentase Pangan Segar Aman. Indikator ini mempunyai target sebesar 100%, realisasi sebesar 100,00%, sehingga capaian kinerjanya 100,00%. Dari 30 sampel pangan segar asal tumbuhan tidak ditemukan indikasi adanya residu pestisida. Program ini didukung oleh 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan.

10. Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan indikator Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten. Indikator ini mempunyai target 100,00%, realisasi 100,00%, sehingga capaian kinerjanya 100,00%. Jumlah kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang dilaksanakan sama dengan jumlah kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang direncanakan. Program ini didukung oleh 7 kegiatan dan 23 sub kegiatan.

11. Persentase Penyediaan Sarana Pertanian bagi Kelompok Tani

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan indikator Persentase Penyediaan Sarana Pertanian bagi Kelompok Tani. Indikator ini mempunyai target 90%, realisasi 143,03%, sehingga capaian kinerjanya 158,92%. Program ini didukung oleh 3 kegiatan dan 5 sub kegiatan.

12. Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian bagi Kelompok Tani

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan indikator Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian bagi Kelompok Tani. Indikator ini mempunyai target 60%, realisasi 81,85%, sehingga capaian kinerjanya 136,42%. Program ini didukung oleh 3 kegiatan dan 6 sub kegiatan.

13. Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular

Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan indikator Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular. Indikator ini mempunyai target 16%, realisasi 16,14%, sehingga capaian kinerjanya 100,86%. Program ini didukung oleh 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan.

14. Persentase Fasilitasi Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT

Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan indikator Persentase Fasilitasi Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT. Indikator ini mencapai target 100%, realisasi 100%, sehingga capaian kinerjanya 100,00%. Program ini didukung oleh 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan.

15. Persentase Kenaikan Jumlah Petani Milenial

Program Penyuluhan Pertanian dengan indikator Persentase Kenaikan Jumlah Petani Milenial. Indikator ini mempunyai target 60%, realisasi 80%, sehingga capaian kinerjanya 133,33%. Program ini didukung oleh 1 kegiatan dan 3 subkegiatan.

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Th. 2024 (thn n-2)	Th. 2025 (thn n-1)	Th. 2026 (thn n)	Th. 2027 (thn n+1)	Th. 2024 (thn n-2)	Th. 2025 (thn n-1)	Th. 2026 (thn n)	Th. 2027 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Indikator Renstra 2021-2025											
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (satuan: indeks)			89,77	90,73	91,70	92,00	90,42	-	91,70	92,00	Indikator akan dilanjutkan dalam Renstra 2025-2029
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (satuan: indeks)			81,00	82,00	83,00		88,66	89,83			
3	Produktivitas Pertanian (satuan: ton/ ha)			6,70	6,80	7,10		7,05	7,80			
4	Ketersediaan Pangan Utama (satuan: kg/ kapita)			250,00	251,00	252,00		254,54	133,40			
5	Persentase Kenaikan Produksi Pertanian (satuan: %)			1,25	1,25	1,25		1,28	-54,39			
6	Persentase Infrastruktur yang Disediakan (satuan: %)			60,00	80,00	100,00		60,00	60,00			
7	Persentase Ketersediaan Pangan Utama (satuan: %)			100,00	100,00	100,00		286,64	165,51			
8	Persentase Penanganan pada Daerah Rawan/ Rentan Pangan (satuan: %)			14,79	19,72	19,72		21,13	7,04			
9	Persentase Pangan Segar Aman (satuan: %)			100,00	100,00	100,00		100,00	100,00			
10	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten (satuan: %)			100,00	100,00	100,00		100,00	100,00			

11	Persentase Penyediaan Sarana Pertanian bagi Kelompok Tani (satuan: %)			90,00	95,00	100,00		143,03	143,03			
12	Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian bagi Kelompok Tani (satuan: %)			60,00	80,00	100,00		81,85	81,85			
13	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (satuan: %)			16,00	19,00	23,00		16,14				
14	Persentase Fasilitasi Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (satuan: %)			100,00	100,00	100,00		100,00	100,00			
15	Persentase Jumlah Usulan Izin Usaha Pertanian (satuan: %)			100,00	100,00	100,00		100,00	100,00			
16	Persentase Kenaikan Jumlah Petani Milenial (satuan: %)			60,00	80,00	100,00		80,00	80,00			
Indikator Renstra 2025-2029												
17	Produksi Tanaman Pangan (satuan: Ton/ th)			425.044	429.295	433.588	437.924	425.044	-	433.588	437.924	
18	Produksi Hortikultura (satuan: Ton/ th)			100.032	102.033	104.073	106.155	100.032	-	104.073	106.155	
19	Produksi Perkebunan (satuan: Ton/ th)			39.063	39.453	39.848	40.246	39.063	-	39.848	40.246	
20	Produksi Daging (satuan: Ton/ th)			9.645	9.742	9.839	9.938	9.645	-	9.839	9.938	
21	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (satuan: %)			11,51	11,30	11,00	10,80	11,51	-	11,00	10,80	
22	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (satuan: angka)			73,30	68,02	70,45	72,89	73,30	-	70,45	72,89	
23	Produksi Padi (satuan: Ton/ th)			390.600	391.576	392.555	393.537	390.600		392.555	393.537	
24	Produksi Jagung (satuan: Ton/ th)			6.635	6.655	6.675	6.695	6.635		6.675	6.695	

25	Produksi Cabai (satuan: Ton/ th)			3.251	3.264	3.277	3.290	3.251		3.277	3.290	
26	Produksi Durian (satuan: Ton/ th)			5.880	5.895	5.909	5.924	5.880		5.909	5.924	
27	Produksi Biofarmaka (satuan: Ton/ th)			4.464	4.475	4.487	4.498	4.464		4.487	4.498	
28	Produksi Kelapa (satuan: Ton/ th)			36.752	36.899	37.046	37.194	36.752		37.046	37.194	
29	Produksi Kopi (satuan: Ton/ th)			165	166	166	167	165		166	167	
30	Produksi Tembakau (satuan: Ton/ th)			292	294	295	297	292		295	297	
31	Populasi Ternak (satuan: ST/ th)			117.322	119.081	120.868	122.681	117.322		120.868	122.681	
32	Persentase Kemanfaatan Prasarana Pertanian (satuan: %)			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00	
33	Penurunan kasus penyakit hewan menular strategis (satuan: Kasus)			306,00	300,00	294,00	288,00	306,00	-	294,00	288,00	
34	Persentase Fasilitasi Pengendalian Penanggulangan Bencana Pertanian (satuan: %)			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00	
35	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Terlayani (satuan: %)			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00	
36	Persentase Penerapan Teknologi Pertanian (satuan: %)			15,01	18,03	21,01	24,00	15,01	-	21,01	24,00	
37	Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani (satuan: Skor)			239,00	250,00	260,00	270,00	239,00	-	260,00	270,00	
38	Angka Kecukupan Energi (satuan: Kkal/ kapita/ hari)			1866,00	1866,00	1880,00	1900,00	1866,00	-	1880,00	1900,00	
39	Angka Kecukupan Protein (satuan: Gram/ kapita/ hari)			55,70	55,70	56,00	56,10	55,70	-	56,00	56,10	
40	Jumlah Desa Rawan/ Rentan Pangan yang ditangani (satuan: Desa)			30,00	31,00	10,00	10,00	30,00	-	10,00	10,00	

41	Persentase Pangan Segar Aman (satuan: %)			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00	
42	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten (satuan: %)			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00	
Indikator Kinerja Kunci												
43	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan) (satuan: %)		√	5,55	75,00	75,00	75,00	5,55	-	75,00	75,00	
44	Produktivitas pertanian per hektar per tahun (satuan: Ton/ ha)		√	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	-	6,90	6,90	
45	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (satuan: %)		√	-16,14	-19,00	-20,00	-20,00	-16,14	-	-20,00	-20,00	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tidak terlepas dari dinamika pembangunan daerah serta berbagai isu strategis yang memengaruhi keberlanjutan sektor pangan dan pertanian. Sektor ini memiliki peran vital dalam mendukung ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan petani, sekaligus menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat sejumlah permasalahan, hambatan, serta tantangan yang perlu dijawab, sekaligus peluang yang dapat dimanfaatkan untuk perumusan program dan kegiatan prioritas di masa mendatang.

Secara umum, permasalahan utama yang dihadapi adalah masih rendahnya produktivitas pertanian akibat keterbatasan adopsi teknologi, kurangnya inovasi budidaya, dan terbatasnya akses petani terhadap sarana produksi berkualitas. Ketersediaan infrastruktur pertanian seperti jaringan irigasi, jalan usaha tani, serta fasilitas penyimpanan dan pengolahan hasil pertanian masih belum optimal sehingga memengaruhi efisiensi produksi dan distribusi. Di sisi lain, persoalan regenerasi petani juga menjadi isu krusial, dimana sebagian besar pelaku utama berusia lanjut sementara minat generasi muda terhadap sektor pertanian masih rendah. Dari aspek ketahanan pangan, kerawanan pangan masih ditemukan di beberapa wilayah akibat ketidakmerataan distribusi, rendahnya diversifikasi konsumsi pangan, serta tingginya ketergantungan pada beras sebagai bahan pangan pokok.

Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, terdapat pula hambatan struktural maupun teknis yang dihadapi. Keterbatasan anggaran daerah membuat ruang gerak dalam mendukung program prioritas menjadi terbatas. Koordinasi antar perangkat daerah terkait, misalnya dengan sektor pekerjaan umum untuk irigasi atau perdagangan untuk pemasaran hasil pertanian, masih belum optimal. Akses permodalan bagi petani juga menjadi persoalan karena persyaratan perbankan yang sulit dipenuhi, sementara alternatif pembiayaan non-bank masih belum berkembang dengan baik. Selain itu, kapasitas sumber daya manusia baik aparatur maupun penyuluh pertanian masih perlu diperkuat, terutama dalam hal penguasaan teknologi digital, sistem informasi, serta manajemen data pangan dan pertanian.

Sektor ketahanan pangan dan pertanian juga menghadapi tantangan besar di masa depan. Perubahan iklim semakin nyata berdampak pada pola musim tanam, meningkatnya risiko serangan hama dan penyakit, serta ancaman gagal panen yang berimplikasi langsung terhadap ketersediaan pangan. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat menuntut ketersediaan pangan yang cukup, aman, dan bergizi, sementara pola konsumsi masyarakat juga terus berkembang dengan semakin tingginya kebutuhan terhadap produk pangan sehat, organik, dan berstandar kualitas tinggi. Globalisasi dan dinamika pasar dunia turut memberikan tantangan berupa persaingan harga, kualitas, dan daya saing produk pertanian daerah.

Namun demikian, di balik tantangan tersebut terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan. Dukungan kebijakan nasional di bidang ketahanan pangan dan pertanian, termasuk program penguatan cadangan pangan, pengembangan lumbung pangan masyarakat, serta modernisasi pertanian melalui mekanisasi dan digitalisasi, menjadi modal penting bagi daerah. Potensi lahan pertanian yang masih luas dapat dioptimalkan dengan pendekatan intensifikasi dan diversifikasi komoditas unggulan daerah. Perkembangan teknologi informasi, e-commerce, dan smart farming membuka ruang baru bagi efisiensi produksi sekaligus akses pasar yang lebih luas. Kesadaran masyarakat yang semakin tinggi terhadap pentingnya pangan sehat, organik, dan ramah lingkungan juga dapat mendorong tumbuhnya pasar baru bagi produk pertanian lokal.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan rekomendasi dan catatan strategis yang dapat menjadi arah dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

1. Penguatan sistem ketahanan pangan daerah melalui peningkatan cadangan pangan pemerintah daerah, diversifikasi konsumsi pangan, dan pengembangan sistem distribusi yang lebih efisien dan merata.
2. Peningkatan produktivitas pertanian melalui mekanisasi, penggunaan teknologi tepat guna, serta pemanfaatan riset dan inovasi pertanian.
3. Pengembangan sumber daya manusia pertanian, terutama melalui pemberdayaan petani milenial, penguatan kapasitas penyuluh, serta fasilitasi akses permodalan dan pasar.
4. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pertanian secara berkelanjutan, khususnya jaringan irigasi, jalan usaha tani, serta fasilitas pascapanen.
5. Penguatan kelembagaan petani melalui koperasi atau kelompok tani agar memiliki daya tawar lebih baik. Selain itu, strategi adaptasi terhadap perubahan iklim dengan mendorong pertanian ramah lingkungan dan praktik budidaya berkelanjutan perlu menjadi arus utama dalam setiap program.

Dengan demikian, isu-isu penting yang telah diuraikan tersebut dapat dijadikan sebagai landasan dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Hal ini diharapkan mampu mengarahkan pembangunan sektor pertanian daerah menuju kemandirian pangan, peningkatan kesejahteraan petani, sekaligus mewujudkan pertanian yang modern, berdaya saing, dan berkelanjutan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada rancangan awal RKPD tahun 2026, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan adalah sebanyak 10 program, yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah/ eks rutin), dan 10 program pelaksanaan / pembangunan
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo adalah sebanyak 23 kegiatan, yang terdiri dari 7 kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 16 kegiatan pelaksanaan/pembangunan
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo pada tahun 2026 adalah sebanyak 50 sub kegiatan, yang terdiri dari 24 sub kegiatan penunjang (sub kegiatan pada setiap perangkat daerah/ eks rutin), dan 26 sub kegiatan pelaksanaan/pembangunan
4. Jumlah total kebutuhan dana/ pagu indikatif adalah sebesar Rp 48.730.618.800,00 yang bersumber dari dana APBD, dengan perincian:
 - a. Rp 22.224.361.400,00 untuk program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah/ eks rutin)
 - b. Rp 26.506.257.400,00 untuk program dan kegiatan pelaksanaan/ pembangunan (eks pembangunan)

Selanjutnya dilakukan analisa kebutuhan atas Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 tersebut. Analisa dibuat dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya, skala prioritas berdasarkan permasalahan yang mendesak untuk ditangani, serta isu-isu strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo. Dari hasil analisa kebutuhan, maka

Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2026 akan dilaksanakan melalui:

1. 10 program dari 11 program sebagaimana pada rancangan awal RKPD 2026, Program Perizinan Usaha Pertanian tidak dilaksanakan dengan pertimbangan aktivitas pada program tersebut bisa dilaksanakan melalui aktivitas pada program lain.
2. 22 kegiatan yang terdiri dari 7 kegiatan penunjang dan 15 kegiatan pelaksana/ pembangunan. Kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan yaitu: Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota dengan pertimbangan aktivitas pada kegiatan bisa dilaksanakan melalui aktivitas pada kegiatan lain.
3. 47 sub kegiatan yang terdiri dari 23 sub kegiatan penunjang dan 24 sub kegiatan pelaksana/ pembangunan. Perubahan sub kegiatan dengan pertimbangan tidak terlalu mendesak, outputnya bisa ditunda dan ada juga yang dapat digabungkan dengan sub kegiatan yang lain.
 - a. Penambahan sub kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah, aktivitas sub kegiatan penyusunan data dasar pembangunan (data statistik pertanian) sebelumnya dari sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD tidak jadi dilaksanakan, aktivitas sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD digabung ke sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD.
 - c. Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi tidak jadi dilaksanakan.
 - d. Sub kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian tidak jadi dilaksanakan karena tidak adanya proposal permohonan bantuan bibit tanaman.
 - e. Sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian tidak jadi dilaksanakan karena aktivitas sub kegiatan bisa dipenuhi dari aktivitas sub kegiatan yang lain.
4. Jumlah total kebutuhan dana/ pagu indikatif adalah sebesar Rp 45.014.867.356,00 yang bersumber dari dana APBD, dengan perincian:
 - a. Rp 21.215.685.056,00 untuk program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah/ eks rutin).
 - b. Rp 23.799.182.300,00 untuk program dan kegiatan pelaksanaan/ pembangunan (eks pembangunan).

Tabel 2.3.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2026

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	22.224.361.400	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	21.215.685.056	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Dokumen	153.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Dokumen	37.185.100	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
		Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19 Dokumen	45.000.000		Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22 Dokumen	17.415.800	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
		Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	108.000.000		Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Laporan	3.474.700	
						Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah					
							Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	16.294.600	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	45 Laporan	20.918.996.200	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	45 Laporan	20.244.000.456	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					

		Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	10.000.000						
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Dokumen	404.529.900	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Dokumen	289.058.100	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
		Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.447.000		Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2.936.600	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					
		Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5.968.500		Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	3.975.300	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
		Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	204.996.000		Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	184.997.400	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
		Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	17.981.000		Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	8.400.000	
	Penyediaan Bahan/Material					Penyediaan Bahan/Material					
		Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	7.601.400		Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	5.937.800	

	Fasilitasi Kunjungan Tamu					Fasilitasi Kunjungan Tamu					
		Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	3.750.000		Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	1.800.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
		Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	151.189.000		Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	74.411.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					
		Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	6.597.000		Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	6.600.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24 Laporan	369.390.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24 Laporan	367.054.600	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
		Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	84.990.000		Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	83.182.600	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
		Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	284.400.000		Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	283.872.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 Laporan	365.938.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 Laporan	277.413.600	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
		Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.950.000		Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.950.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
		Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	237.600.000		Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	159.940.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
		Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	17.770.000		Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	15.580.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
		Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	59.858.000		Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	51.900.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					

		Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	8.540.000		Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 Unit	8.540.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah					Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah					
		Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	0.096 Ha	2.220.000		Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	0.0716 Ha	1.503.600	
2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		Angka Kecukupan Energi Angka Kecukupan Protein	1880 Kkal/ kapita/ hari 56 gram/ kapita/ hari	1.541.000.000	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		Angka Kecukupan Energi Angka Kecukupan Protein	1880 Kkal/ kapita/ hari 56 gram/ kapita/ hari	555.749.200	
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Dokumen Ketersediaan Pangan yang Disusun	1 Dokumen	122.000.000	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Dokumen Ketersediaan Pangan yang Disusun	1 Dokumen	46.153.300	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya					
		Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1 Laporan	75.000.000		Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1 Laporan	36.743.800	
	Pemantauan Stok Pangan					Pemantauan Stok Pangan					
		Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Informasi Stok Pangan	1 Dokumen	22.000.000		Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Informasi Stok Pangan	1 Dokumen	6.750.000	
	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)					Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)					

		Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	25.000.000		Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	2.659.500	
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		Laporan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Laporan	1.350.000.000	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		Laporan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Laporan	494.490.400	
	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota					Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota					
		Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Ton	1.350.000.000		Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	40 Ton	494.490.400	
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per kapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		Jumlah Kelompok Masyarakat yang Diberdayakan dalam rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang	5 Kelompok	69.000.000	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per kapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		Jumlah Kelompok Masyarakat yang Diberdayakan dalam rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang	5 Kelompok	15.105.500	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal					Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal					
		Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	69.000.000		Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	15.105.500	
3	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		Jumlah Desa Rawan/ Rentan Pangan yang ditangani	10 Desa	365.000.000	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		Jumlah Desa Rawan/ Rentan Pangan yang ditangani	10 Desa	91.021.800	
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan		Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Disediakan	1 Dokumen	15.000.000	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan		Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Disediakan	1 Dokumen	5.398.600	
	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan					Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan					

		Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	15.000.000		Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	5.398.600	
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		Kerawanan Pangan yang Ditangani	1 Dokumen	350.000.000	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		Kerawanan Pangan yang Ditangani	1 Dokumen	85.623.200	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota					Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota					
		Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1 Laporan	350.000.000		Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1 Laporan	85.623.200	
4	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		Persentase Pangan Segar Aman	100 %	60.000.000	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		Persentase Pangan Segar Aman	100 %	22.017.500	
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		Data Pengawasan Pangan Segar yang Disediakan	1 Dokumen	60.000.000	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		Data Pengawasan Pangan Segar yang Disediakan	1 Dokumen	22.017.500	
	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota					Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota					
		Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	20.000.000		Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	3.039.000	
	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota					Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota					
		Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	20.000.000		Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	11.488.400	

	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan					Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan					
		Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	20.000.000		Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	7.490.100	
5	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Persentase Kemanfaatan Penyediaan Sarana Pertanian Persentase Kemanfaatan Penyediaan Sarana Peternakan	100 % 100 %		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Persentase Kemanfaatan Penyediaan Sarana Pertanian Persentase Kemanfaatan Penyediaan Sarana Peternakan	100 % 100 %	11.853.910.500	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian yang Dilaksanakan	1 Dokumen	3.679.337.000	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian yang Dilaksanakan	1 Dokumen	3.301.428.800	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi					Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi					
		Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	2.849.831.400		Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	3.301.428.800	
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian										
		Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	829.505.600						
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan yang Dikelola Sumber Daya Genetik (SDG) Tanaman yang Dikelola	1 Dokumen 1 Dokumen	3.495.442.000	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan yang Dikelola Sumber Daya Genetik (SDG) Tanaman yang Dikelola	1 Dokumen 1 Dokumen	3.438.927.500	
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman					Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman					
		Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	3.421.442.000		Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	3.020.780.000	

	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman					Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman					
		Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	1 Varietas Unggul Baru (VUB)	74.000.000		Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	1 Varietas Unggul Baru (VUB)	418.147.500	
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain yang Dilaksanakan	1 Dokumen	6.610.999.500	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain yang Dilaksanakan	1 Dokumen	5.113.554.200	
	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain					Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain					
		Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	857 Ekor	6.610.999.500		Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	808 Ekor	5.113.554.200	
6	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Persentase Kemanfaatan Prasarana Pertanian	100 %	8.203.370.600	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Persentase Kemanfaatan Prasarana Pertanian	100 %	8.562.628.700	
	Pembangunan Prasarana Pertanian		Pembangunan Prasarana Pertanian yang Dilaksanakan	1 Dokumen	8.170.772.700	Pembangunan Prasarana Pertanian		Pembangunan Prasarana Pertanian yang Dilaksanakan	1 Dokumen	8.546.385.700	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani					
		Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	56 Unit	5.611.027.000		Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	49 Unit	5.987.547.700	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani					
		Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	27 Unit	2.559.745.700		Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	20 Unit	2.558.838.000	

	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Wilayah Sumber Bibit Kambing Kaligesing yang Dikelola	12 Bulan	32.597.900	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Wilayah Sumber Bibit Kambing Kaligesing yang Dikelola	12 Bulan	16.243.000	
	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak					Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak					
		Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	1 Laporan	32.597.900		Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	1 Laporan	16.243.000	
7	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis	294 Kasus	586.217.900	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis	294 Kasus	396.842.700	
	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota		Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner yang Dikelola	1 Dokumen	509.201.500	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota		Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner yang Dikelola	1 Dokumen	346.623.900	
	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner					Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner					
		Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 Laporan	509.201.500		Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 Laporan	346.623.900	
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner yang Dilaksanakan	1 Dokumen	77.016.400	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner yang Dilaksanakan	1 Dokumen	50.218.800	
	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan					Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan					
		Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1 Laporan	77.016.400		Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1 Laporan	50.218.800	
8	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		Persentase Fasilitas Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	100 %	175.418.100	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		Persentase Fasilitas Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	100 %	151.749.400	

	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang Dilaksanakan	1 Laporan	175.418.100	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang Dilaksanakan	1 Laporan	151.749.400	
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan					Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan					
		Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	350 Ha	175.418.100		Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	250 Ha	151.749.400	
9	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		Persentase Izin Usaha Pertanian yang Terlayani	100%	25.000.000						
	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Fasilitasi Rekomendasi Perizinan Usaha Pertanian	1 Dokumen	25.000.000						
	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian										
		Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	1 Laporan	25.000.000						
10	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Persentase Penerapan Teknologi Pertanian Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani	21.01 % 260 Skor	1.764.471.700	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Persentase Penerapan Teknologi Pertanian Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani	21.01 % 260 Skor	2.165.262.500	
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		Penyuluhan Pertanian yang Dilaksanakan	16 Kecamatan	1.764.471.700	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		Penyuluhan Pertanian yang Dilaksanakan	16 Kecamatan	2.165.262.500	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa					Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa					
		Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	16 Unit	300.843.900		Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	16 Unit	1.308.080.200	
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa					Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa					

		Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2500 Unit	1.263.485.400		Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2500 Unit	764.835.800	
	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota					Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota					
		Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	5 Unit	175.142.400		Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	5 Unit	81.467.400	
	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani					Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani					
		Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	1 Unit	25.000.000		Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	1 Unit	10.879.100	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penyusunan program dan kegiatan pembangunan daerah merupakan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu sumber usulan program dan kegiatan tersebut berasal dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat, sebagai pelaku utama pembangunan, memiliki pemahaman mendalam mengenai kebutuhan dan potensi di lingkungan mereka. Oleh dan untuk itu, pemerintah daerah perlu membuka ruang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui mekanisme pengusulan program dan kegiatan. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melaksanakan proses penelaahan terhadap berbagai usulan program dan kegiatan yang berasal dari dua sumber utama, yaitu hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

1. Usulan Musrenbang

Musrenbang merupakan forum tahunan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari masyarakat desa/ kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten/ kota, untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan pembangunan di wilayah masing-masing. Usulan yang muncul dari Musrenbang adalah usulan pembangunan jalan usaha tani sebanyak 1 unit.

2. Usulan Reses/ Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Purworejo

Selain Musrenbang, sumber penting lainnya dalam proses perencanaan adalah Pokok-Pokok Pikiran DPRD. Pokir merupakan hasil penjangkaran aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh anggota dewan melalui reses, kunjungan kerja, dan dialog publik. Dalam konteks ketahanan pangan dan pertanian, Pokir sering kali mencerminkan kebutuhan spesifik wilayah konstituen. Usulan dari Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Purworejo tahun 2026 terdiri dari:

- a. Pembangunan Jalan Usaha Tani sebanyak 47 usulan
- b. Jaringan Irigasi Usaha Tani sebanyak 17 usulan
- c. Irigasi Air Tanah Dangkal (ATD) sebanyak 4 usulan
- d. Bibit Ternak Domba sebanyak 12 usulan
- e. Bibit Ternak Kambing Jawa Randu sebanyak 65 usulan
- f. Bibit Ternak Sapi sebanyak 24 usulan
- g. Bibit Ternak Kambing Kaligesing sebanyak 32 usulan
- h. Alat Pengolah Pupuk Organik sebanyak 1 usulan
- i. Combine Harvester Besar sebanyak 1 usulan
- j. Cultivator sebanyak 4 usulan
- k. Kendaraan Roda Tiga sebanyak 19 usulan
- l. Pompa Air 3 inch sebanyak 3 usulan
- m. Pompa Air 4 inch sebanyak 3 usulan
- n. Power Traser Multiguna sebanyak 1 usulan
- o. Traktor Tangan Roda 2 Daya Penggerak Min. 6 HP sebanyak 5 usulan
- p. Traktor Tangan Roda 2 Daya Penggerak Min. 8 HP sebanyak 5 usulan
- q. Traktor Tangan Roda 2 Type Rotary Daya Penggerak Min. 10 HP sebanyak 11 usulan

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kemudian melakukan verifikasi lapangan dan analisis kelayakan. Usulan yang memenuhi kriteria akan diintegrasikan ke dalam Renja sebagai bagian dari upaya harmonisasi antara aspirasi masyarakat dan kebijakan pembangunan daerah.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		- Jumlah Produksi Padi - Jumlah Produksi Jagung - Jumlah Produksi Cabai - Jumlah Produksi Durian - Jumlah Produksi Biofarmaka - Jumlah Produksi Kelapa - Jumlah Produksi Kopi - Jumlah Produksi Tembakau - Populasi Ternak	392.555 Ton/ ha 6.675 Ton/ ha 3.277 Ton/ ha 5.909 Ton/ ha 4.487 Ton/ ha 37.046 Ton/ ha 166 Ton/ ha 295 Ton/ ha 120.868 Ton/ ha	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian yang Dilaksanakan	1 Dokumen	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kab. Purworejo	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	- Permohonan Hibah Pemanfaatan Lahan Pekarangan (P2L) = 2 Kelompok - Permohonan Hibah Alat Pengolah Pupuk Organik = 1 Kelompok - Permohonan Hibah Combine Harvester Besar = 1 Kelompok - Permohonan Hibah Cultivator = 5 Kelompok - Permohonan Hibah Kendaraan Roda 3 = 17 Kelompok - Permohonan Hibah Pompa Air 3 inch = 2 Kelompok - Permohonan Hibah Pompa Air 4 inch = 2 Kelompok - Permohonan Hibah Traktor Roda 2 Daya Penggerak Min. 6 HP = 4 Kelompok - Permohonan Hibah Traktor Roda 2 Daya Penggerak Min. 8 HP = 4 Kelompok - Permohonan Hibah Traktor Rotary Daya Penggerak Min. 10 HP = 10 Kelompok
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		- Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan yang Dikelola - Sumber Daya Genetik (SDG) Tanaman yang Dikelola	- 1 Dokumen - 1 Dokumen	
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kab. Purworejo	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	- Permohonan Hibah Bibit Ternak Kambing Kaligesing = 30 Kelompok

	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain yang Dilaksanakan	1 Dokumen	
	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kab. Purworejo	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	808 Ekor	- Permohonan Hibah Bibit Ternak Domba = 11 Kelompok - Permohonan Hibah Bibit Ternak Kambing Jawa Randu = 52 Kelompok - Permohonan Hibah Bibit Ternak Sapi = 23 Kelompok
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Persentase Kemanfaatan Prasarana Pertanian	100 %	
	Pembangunan Prasarana Pertanian		Pembangunan Prasarana Pertanian yang Dilaksanakan	1 Dokumen	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kab. Purworejo	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	49 Unit	- Permohonan Hibah Pembangunan JUT = 49 Kelompok
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kab. Purworejo	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	20 Unit	- Permohonan Hibah Rehabilitasi RJIT = 17 Kelompok - Permohonan Hibah Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal (ATD) = 3 Kelompok

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dengan adanya pergantian Presiden dan Wakil Presiden maka dibentuklah kabinet Pemerintahan yang baru dengan nama Kabinet Merah Putih. Kabinet Merah Putih ini akan membantu Presiden dan Wakil Presiden untuk bersama-sama mewujudkan visi dan misinya. Visi Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran adalah Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Adapun misinya ada delapan yang terkenal dengan Asta Cita sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Di antara delapan misi tersebut, beberapa sangat relevan dengan sektor pangan dan pertanian, antara lain: Misi 2, Misi 3, Misi 4 dan Misi 8. Arah kebijakan ini menunjukkan momentum kuat untuk memperkuat sektor pertanian melalui pendekatan modern, inklusif, berbasis lingkungan, serta berbasis Sumber Daya Manusia (SDM).

1.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, juga merupakan tujuan akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tahun 2026
1	Peningkatan Produksi Pertanian, Kecukupan Konsumsi Pangan, dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Produksi Tanaman Pangan	427.107,95 Ton/ th
			Produksi Hortikultura	82.413,56 Ton/ th
			Produksi Perkebunan	39.375,85 Ton/ th
			Produksi Daging	9.839,36 Ton/ th
			Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	11,00
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70,45
2		Meningkatnya Produksi Pertanian	Produksi Tanaman Pangan	427.107,95 Ton/ th
			Produksi Hortikultura	82.413,56 Ton/ th
			Produksi Perkebunan	39.375,85 Ton/ th
			Produksi Daging	9.839,36 Ton/ th
3		Meningkatnya Keragaman dan Keseimbangan Konsumsi Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	91,70
4		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70,45

1.3. Program dan Kegiatan

Penentuan Program dan Kegiatan ditetapkan dengan pertimbangan antara lain:

1. Pencapaian visi dan misi kepala daerah
2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi
3. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah
4. Isu strategis Perangkat Daerah

Program pada Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2026 sejumlah 9 program yaitu:

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
 - a. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
Aktivitas Sub Kegiatan:
 - Gerakan Pangan Murah
 - Pasar Tani
 - Pemantauan Stok Bahan Pangan
 - Penyusunan Neraca Bahan Makanan
 - b. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota
Aktivitas Sub Kegiatan:
 - Pengadaan cadangan pangan pemerintah
 - c. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per kapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
Aktivitas Sub Kegiatan:
 - Pelatihan pengolahan pangan
 - Sosialisasi pola konsumsi Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA)
 - Penyusunan dokumen Pola Pangan Harapan (PPH)
2. Program Penanganan Kerawanan Pangan
 - a. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
Aktivitas Sub Kegiatan:
 - Penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan
 - b. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
Aktivitas Sub Kegiatan:
 - Pelatihan di desa rentan rawan pangan
3. Program Pengawasan Keamanan Pangan
 - a. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
Aktivitas Sub Kegiatan:
 - Pembinaan dan Monitoring ke Pelaku Usaha
 - Pengawasan Keamanan Pangan
 - Pelatihan Penerapan Penanganan yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Aktivitas Sub Kegiatan:
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan (RKA, DPA, Renja)
 - Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja (laporan fisik keuangan, evaluasi renja)
 - Penyusunan data statistik pertanian
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Aktivitas Sub Kegiatan:
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- Penyusunan Laporan Keuangan (laporan keuangan bulanan, triwulan, akhir)
- c. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
Aktivitas Sub Kegiatan:
 - Pelaporan Retribusi Daerah
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Aktivitas Sub Kegiatan:
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Aktivitas Sub Kegiatan:
 - Penyediaan Komponen Listrik
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor (minum pegawai, pakan rusa)
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan/ Material (ATK Dinas)
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penataan Arsip OPD (box arsip)
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Aktivitas Sub Kegiatan:
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (non ASN)
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Aktivitas Sub Kegiatan:
 - Pemeliharaan Kendaraan Dinas (mobil, sepeda motor)
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (PC/ komputer, printer)
 - Pemeliharaan Gedung Kantor
 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor (AC)
 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Tanah (sewa untuk BPP Ngombol)
- 5. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
 - a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
Aktivitas Sub Kegiatan:
 - Demplot pengembangan varietas tembakau
 - Pelatihan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA)
 - Hibah Pemanfaatan Lahan Pekarangan (P2L)
 - Hibah Alat Pengolah Pupuk Organik
 - Hibah Combine Harvester Besar
 - Hibah Cultivator
 - Hibah Kendaraan Roda Tiga
 - Hibah Pompa Air 3 inch
 - Hibah Pompa Air 4 inch
 - Hibah Traktor Roda 2 Daya Penggerak Min. 6 HP
 - Hibah Traktor Roda 2 Daya Penggerak Min. 8 HP
 - Hibah Traktor Rotary Daya Penggerak Min. 10 HP
 - b. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
Aktivitas Sub Kegiatan:
 - Hibah Bibit Ternak Kambing Kaligesing
 - Layanan Inseminasi Buatan (IB)
 - Penangkaran benih tembakau
 - c. Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Lain
Aktivitas Sub Kegiatan:

- Hibah Bibit Ternak Domba
 - Hibah Bibit Ternak Kambing Jawa Randu
 - Hibah Bibit Ternak Sapi
6. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- a. Pembangunan Prasarana Pertanian
- Aktivitas Sub Kegiatan:
- Hibah Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT)
 - Hibah Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT)
 - Hibah Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal (ATD)
- b. Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota
- Aktivitas Sub Kegiatan:
- Pengawasan wilayah sumber bibit Kambing Kaligesing
7. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- a. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Aktivitas Sub Kegiatan:
- Pelayanan Kesehatan Hewan
- b. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
- Aktivitas Sub Kegiatan:
- Operasional Rumah Potong Hewan (RPH)
 - Pelatihan Juru Sembelih Halal (Juleha)
 - Pengawasan hewan kurban
 - Pengawasan Bahan Pangan Asal Hewan (BPAH)
8. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- a. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
- Aktivitas Sub Kegiatan:
- Gerakan Pengendalian (Gerdal) Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)
 - Sekolah Lapang (SL) Agensia Hayati
 - Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT)
9. Program Penyuluhan Pertanian
- a. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
- Aktivitas Sub Kegiatan:
- Fasilitasi Badan Penyuluhan Pertanian (BPP)
 - Fasilitasi Komisi Penyuluhan
 - Penyusunan Programa Penyuluhan
 - Biaya Operasional Penyuluh (BOP)
 - Pelatihan budidaya tembakau
 - Pembinaan KTNA
 - Penilaian Kelas Kelompok Tani
 - Pembinaan Petani Milenial
 - Pembinaan kelembagaan petani

Pengarusutamaan gender (PUG) adalah strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dengan memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan mempertimbangkan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam seluruh siklus perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Program/ kegiatan/ sub kegiatan yang mendukung PUG mencakup berbagai upaya untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam berbagai sektor dan tingkatan.

Sub kegiatan yang mendukung PUG dalam Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2026 adalah sub kegiatan

Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman dan sub kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/ Kota. Rencana aksi sub kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman dalam rangka mendukung PUG adalah sebagai berikut:

1. Melibatkan kelompok wanita tani (KWT) dalam kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan melalui Hibah Ternak Kambing Kaligesing
2. Memotivasi petani perempuan akan pentingnya peningkatan kualitas SDG Ternak, sehingga petani perempuan mau berkontribusi dalam budidaya kambing Kaligesing.
3. Mendorong petani perempuan agar terlibat dalam kepengurusan kelompok tani tidak sebatas sebagai anggota
4. Memotivasi petani perempuan untuk melakukan hal yang lebih besar lagi dalam membantu usaha tani suaminya.

Sedangkan rencana aksi sub kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/ Kota dalam rangka mendukung PUG adalah sebagai berikut:

1. Melibatkan kelompok wanita tani (KWT) dalam kegiatan sekolah lapang
2. Memotivasi petani perempuan akan pentingnya sekolah lapang sehingga mau menjadi peserta sekolah lapang
3. Mendorong petani perempuan agar terlibat dalam kepengurusan kelompok tani tidak sebatas sebagai anggota
4. Memotivasi petani perempuan untuk melakukan hal yang lebih besar lagi dalam membantu usaha tani suaminya.

Adapun rincian program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, dan kebutuhan dana sebagai berikut:

Tabel 3.2

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo

[illegible]

							Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	16.294.600,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Aparatur		25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	0	0	2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		45 Laporan	20.244.000.456,00			-	-	Aparatur	-	21.018.000.000,00	
	2	0	0	2	0		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
					0			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			205 Orang/bulan	20.236.177.956,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Aparatur		21.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	0	0	2	0		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
					0			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			44 Laporan	7.822.500,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Aparatur		18.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	0	0	2	0		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-		16 Laporan	513.200,00			-	-	Aparatur	-	1.600.000,00	
	2	0	0	2	0		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah													
					0			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah			16 Dokumen	513.200,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Aparatur		1.600.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

						Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	7.490.100,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat, Aparatur		24.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					23.130.393.800,00							24.326.000.000,00		
	3	2 7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					23.130.393.800,00							24.326.000.000,00		
5	3	2 7	0 2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Kemanfaatan Penyediaan Sarana Pertanian Persentase Kemanfaatan Penyediaan Sarana Peternakan	100 % 100 %			100 % 100 %	11.853.910.500,00					100 % 100 %	12.920.000.000,00		
	3	2 7	0 2	2 . 0 1		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian yang Dilaksanakan	1 Dokumen			1 Dokumen	3.301.428.800,00			-	-	Masyarakat	1 Dokumen	4.000.000.000,00	
	3	2 7	0 2	2 . 0 1	0 0 1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi														
						Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				1 Laporan	3.301.428.800,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	-	Masyarakat		4.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	3	2 7	0 2	2 . 0 2		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan yang Dikelola Sumber Daya Genetik (SDG) Tanaman yang Dikelola	1 Dokumen 1 Dokumen			1 Dokumen 1 Dokumen	3.438.927.500,00			-	-	Masyarakat, Aparatur	1 Dokumen 1 Dokumen	2.920.000.000,00	
	3	2 7	0 2	2 . 0 2	0 0 2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman														
						Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman				1 Dokumen	3.020.780.000,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat, Aparatur		2.500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	3	2 7	0 2	2 . 0 2	0 0 4	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman														

							Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian				1 Varietas Unggul Baru (VUB)	418.147.500,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	-	Masyarakat, Aparatur		420.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	2	0	2			Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain yang Dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	5.113.554.200,00			-	-	Masyarakat	1 Dokumen	6.000.000.000,00	
	3	2	0	2	0		Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain													
								Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/ kota lain			808 Ekor	5.113.554.200,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		6.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
6	3	2	0				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Kemanfaatan Prasarana Pertanian	-		100 %	8.562.628.700,00						-	8.735.000.000,00	
	3	2	0	2			Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian yang Dilaksanakan	-		1 Dokumen	8.546.385.700,00			-	-	Masyarakat	-	8.700.000.000,00	
	3	2	0	2	0		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani													
							Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				49 Unit	5.987.547.700,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		6.200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	2	0	2	0		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani													
							Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				20 Unit	2.558.838.000,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		2.500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	2	0	2			Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak dalam	Wilayah Sumber Bibit Kambing Kaligesing yang Dikelola	-		12 Bulan	16.243.000,00			-	-	Masyarakat, Aparatur	-	35.000.000,00	

[illegible]

8	3	2	0			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Fasilitasi Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	-			100 %	151.749.400,00					-	295.000.000,00		
	3	2	0	2		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang Dilaksanakan	-			1 Laporan	151.749.400,00			-	-	Masyarakat	-	295.000.000,00	
	3	2	0	2	0	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
							Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				250 Ha	151.749.400,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		295.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
9	3	2	0			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Penerapan Teknologi Pertanian Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani	-			21.01 % 260 Skor	2.165.262.500,00					-	1.678.000.000,00		
	3	2	0	2		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Penyuluhan Pertanian yang Dilaksanakan	-			16 Kecamatan	2.165.262.500,00			-	-	Masyarakat, Aparatur	-	1.678.000.000,00	
	3	2	0	2	0	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa														
							Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				16 Unit	1.308.080.200,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK- DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	-	-	Masyarakat, Aparatur		210.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	2	0	2	0	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa														

							Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				250 Unit	764.835.800,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	-	Masyarakat, Aparatur		1.300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	2	0	2	0	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/ Kota														
		7	7	.	0															
				1	0		Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				5 Unit	81.467.400,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat, Aparatur		140.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	2	0	2	0	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani														
		7	7	.	0															
				1	0		Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk				1 Unit	10.879.100,00	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat, Aparatur		28.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rekapitulasi Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana Kerja dan Pendanaan disusun berdasarkan hasil evaluasi capaian tahun sebelumnya, isu strategis, rencana strategis dan memuat program, kegiatan prioritas yang mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Program dan kegiatan dirancang untuk menjawab kebutuhan pembangunan pertanian yang berkelanjutan, meningkatkan produktivitas, memperkuat ketahanan pangan, serta mendorong inovasi di sektor pertanian. Rencana kerja dan pendanaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo tahun 2026 dapat dijabarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.1.
Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan
dan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2026

No	Urusan	Program	Pagu Indikatif (Rp).	PD/ Ket.
1	PANGAN	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	21.215.685.058,00	DKPP
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	555.749.200,00	DKPP
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	91.021.800,00	DKPP
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	22.017.600,00	DKPP
2	PERTANIAN	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	11.853.910.500,00	DKPP
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	8.546.385.700,00	DKPP
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	396.842.700,00	DKPP
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	151.749.400,00	DKPP
		Program Penyuluhan Pertanian	2.165.262.500,00	DKPP
Jumlah			45.014.867.356,00	

4.2. Dukungan terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah

Program Strategis Nasional merupakan program unggulan yang tercantum dalam dokumen visi dan misi presiden. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah (Pemda) wajib mendukung pelaksanaan Program Strategis Nasional. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo berkomitmen untuk menyelaraskan rencana kerja tahunan dengan Program Strategis Nasional, khususnya dalam optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, pengadaan dan pengelolaan gabah/ beras dalam negeri serta penyaluran cadangan beras pemerintah.

Tabel 4.2.
Dukungan terhadap Program Strategis Nasional

No	Program Strategis Nasional	Program Dukungan di Kabupaten Purworejo	Aktivitas Pendukung di 2026	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Terkait
1	Penanggulangan kemiskinan				
	a. Optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Pasar Tani	Pangan	DKPP
			Memantau harga dan pasokan pangan	Pangan	DKPP
			Pengadaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah	Pangan	DKPP
			Pelatihan olahan pangan lokal	Pangan	DKPP
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Pelatihan pemanfaatan pekarangan untuk desa rentan rawan pangan	Pangan	DKPP
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Penyuluhan pertanian	Pertanian	DKPP
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Penyediaan jaringan irigasi tersier, air tanah dangkal, dan jalan usaha tani	Pertanian	DKPP
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Penyediaan alat dan mesin pertanian	Pertanian	DKPP
			Penyediaan bibit ternak	Pertanian	DKPP
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Pelayanan kesehatan hewan	Pertanian	DKPP
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Pertanian	DKPP
2	Ketahanan pangan				
	a. Pengadaan dan pengelolaan gabah/ beras dalam negeri	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pengadaan cadangan pangan	Pangan	DKPP
	b. Penyaluran cadangan beras pemerintah	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyaluran cadangan pangan	Pangan	DKPP

Dukungan juga dilakukan terhadap Prioritas Nasional dengan kegiatan prioritas utamanya sebagai berikut:

1. Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/ lumbung pangan lainnya
Didukung dengan pembinaan kepada pelaku usaha lumbung pangan masyarakat.
2. Pembangunan pangan hewani
Pembangunan pangan hewani didukung dengan sosialisasi pangan yang Beragam, Bergizi, Simbang, dan Aman (B2SA) dengan menekankan pentingnya konsumsi makanan yang bervariasi, mengandung gizi lengkap, proporsional sesuai kebutuhan tubuh, dan bebas dari cemaran yang membahayakan. Ketersediaan pangan hewani didukung dengan penyediaan bibit ternak sapi, kambing, dan domba kepada masyarakat serta adanya layanan kesehatan hewan.
3. Pembangunan pangan lokal dan nabati
Pembangunan pangan lokal dan nabati adalah upaya untuk meningkatkan produksi dan konsumsi pangan yang berasal dari sumber daya lokal, serta mengutamakan pangan nabati (berasal dari tumbuhan). Tujuannya adalah untuk memperkuat ketahanan pangan, menjaga kelestarian lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Fortifikasi dan biofortifikasi pangan
Fortifikasi dan biofortifikasi adalah dua pendekatan untuk meningkatkan nilai gizi pangan, namun berbeda dalam penerapannya. Fortifikasi menambahkan nutrisi ke makanan selama pemrosesan, sementara biofortifikasi meningkatkan kandungan nutrisi langsung pada tanaman selama budidaya. Fortifikasi dan biofortifikasi pangan didukung dengan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat.
5. Pengelolaan susut dan sisa pangan
Pengelolaan susut dan sisa pangan (SSP) atau *food loss and waste* (FLW) merupakan upaya untuk mengurangi jumlah pangan yang terbuang atau tidak dimanfaatkan di sepanjang rantai pasok pangan. Hal ini penting untuk mencapai ketahanan pangan, meningkatkan efisiensi ekonomi, dan menjaga kelestarian lingkungan. Pengelolaan susut dan sisa pangan didukung dengan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat.

Tabel 4.3
Dukungan terhadap Prioritas Nasional

No	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama	Dukungan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan pada 2026	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
1	Prioritas Nasional 2	Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/ lumbung pangan lainnya	Program: PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Kegiatan: Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Sub Kegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Pangan	DKPP

		Pembangunan pangan hewani	Program: PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Kegiatan: Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan	DKPP
			Program: PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Kegiatan: Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Sub Kegiatan: Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pertanian	DKPP
			Program: PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Pertanian	DKPP
		Pembangunan pangan lokal dan nabati	Program: PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Kegiatan: Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan	DKPP
			Program: PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Kegiatan: Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Sub Kegiatan: Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Pertanian	DKPP

			Program: PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Kegiatan: Pembangunan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan: Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Pertanian	DKPP
			Program: PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Kegiatan: Pembangunan Prasarana Pertanian Sub Kegiatan: Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Pertanian	DKPP
		Fortifikasi dan biofortifikasi pangan	Program: PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Kegiatan: Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Sub Kegiatan: Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Pertanian	DKPP
		Pengelolaan susut dan sisa pangan	Program: PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Kegiatan: Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Sub Kegiatan: Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Pertanian	DKPP

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo juga memberikan dukungan terhadap Program Delegasi Provinsi Juru Sembelih Halal (Juleha), terutama melalui pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan profesionalisme dan memastikan kualitas penyembelihan hewan sesuai syariat Islam. Dukungan ini juga mencakup penyediaan fasilitas dan materi pelatihan, serta pengakuan resmi melalui sertifikat kompetensi. Program Juleha merupakan langkah strategis dalam mewujudkan ekosistem halal yang komprehensif, mulai dari hulu hingga hilir, untuk memberikan jaminan kualitas dan kehalalan produk daging bagi masyarakat.

Tabel 4.4.
Dukungan terhadap Program Delegasi Provinsi

No	Program Delegasi	Aktivitas/ Kegiatan Dukungan pada 2026	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
1	Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan	Pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	Pertanian	DKPP
		Pelatihan juru sembelih halal	Pertanian	DKPP

Program Unggulan Daerah Kabupaten Purworejo yang disebut Pitulungan. Program ini disusun guna menyelesaikan berbagai permasalahan dan merespon berbagai isu strategis yang ada di Kabupaten Purworejo. Setiap program unggulan mencakup beberapa kegiatan unggulan yang mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Purworejo. Dukungan terhadap

Program Unggulan Daerah yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kabupaten Purworejo sebagai berikut:

- 1. Sejahtera Wargane
Memperbaiki keamanan pangan dan menambah aksesibilitas pangan bagi masyarakat dengan aktivitas
 - a. Pengawasan keamanan pangan
 - b. Pengadaan cadangan pangan pemerintah

2. Ayam Petanine
Ayem Petanine merupakan program unggulan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani atau pekerja di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, dan kehutanan melalui optimalisasi infrastruktur usaha tani serta penyediaan akses yang memadai terhadap pupuk, pasar, dan sumber daya pertanian lainnya dengan berfokus pada pengembangan dan perbaikan prasarana serta sarana pertanian, seperti sistem irigasi, jalan usaha tani, dan alat-alat pertanian modern guna meningkatkan produktivitas serta efisiensi usaha tani, serta mendorong kebijakan dan dukungan bagi petani dalam mengakses pupuk bersubsidi, permodalan, serta jaringan pemasaran yang lebih luas dan stabil, sehingga hasil panen dapat terserap dengan baik dan memberikan keuntungan maksimal bagi petani. Dengan strategi yang komprehensif, Ayem Petanine berperan dalam mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan, sekaligus memperkuat sektor pertanian sebagai pilar utama pembangunan ekonomi daerah dan nasional.

Tabel 4.5.
Dukungan terhadap Program Unggulan Daerah

No	Program Unggulan	Kegiatan Unggulan	Aktivitas di 2026	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
1	Sejahtera Wargane	Memperbaiki keamanan pangan dan menambah aksesibilitas pangan bagi masyarakat	Pengawasan keamanan pangan	Pangan	DKPP
			Pengadaan cadangan pangan pemerintah	Pangan	DKPP
2	Ayem Petanine	Menambah penggunaan alat teknologi pertanian (seperti pompa air, sprayer, traktor tangan, sel surya, dll)	Penyediaan alat dan mesin pertanian	Pertanian	DKPP
		Revitalisasi sistem pertanian	Penyediaan sarana dan prasarana pertanian	Pertanian	DKPP
			Penyuluhan pertanian	Pertanian	DKPP
			Pengendalian, pencegahan, dan penanggulangan bencana pertanian	Pertanian	DKPP
		Mengoptimalkan pemakaian pupuk organik	Penyuluhan pertanian	Pertanian	DKPP
		Pengembangan infrastruktur pertanian dalam arti luas	Penyediaan prasarana pertanian	Pertanian	DKPP
		Memperkuat akses pada informasi dan teknologi pertanian	Penyuluhan pertanian	Pertanian	DKPP
		Modernisasi pertanian	Penyediaan alat dan mesin pertanian	Pertanian	DKPP

			Penyuluhan pertanian	Pertanian	DKPP
			Pelayanan inseminasi buatan	Pertanian	DKPP

4.3. Kinerja Perangkat Daerah

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagai Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian, terus berupaya untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan daerah melalui peningkatan produktivitas, keberlanjutan usaha tani, serta keterjangkauan akses pangan bagi masyarakat. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo, sejumlah indikator strategis digunakan untuk menunjukkan perkembangan yang menggambarkan kinerja perangkat daerah secara menyeluruh.

1. Produksi tanaman pangan

Produksi hasil tanaman pangan adalah produksi padi, jagung, kedelai, kacang hijau, kacang tanah, ubi kayu, dan ubi jalar pada tahun berkenaan

2. Produksi hortikultura

Produksi hortikultura adalah produksi alpukat, anggur, belimbing, duku/ langsung/ kokosan, durian, jambu air, jambu biji, jengkol, jeruk besar, jeruk, jeruk siam/ keprok, jeruk pamelon, jeruk lemon, lengkeng, mangga, manggis, markisa/ konyal, melinjo, buah naga, nangka/ cempedak, nenas, pepaya, petai, pisang, rambutan, sawo, salak, sirih, sukun, bawang daun, bawang merah, bayam, buncis, cabai besar, cabai besar/ tw/ teropong, cabai keriting, cabai rawit, jamur, jamur lainnya, jamur tiram, kacang panjang, kangkung, mentimun, labu siam, melon, semangka, terung, tomat, dlingo/ dringo, jahe, jeruk nipis, kapulaga, kencur, kunyit, laos/ lengkuas, lempuyang, mahkota dewa, mengkudu/ pace, rimpang, serai hijau, temu ireng, temu kunci, temu lawak pada tahun berkenaan

3. Produksi perkebunan

Produksi perkebunan adalah produksi aren, cengkeh, jambu mete, jarak pagar, kakao, kapok, karet, kelapa dalam, kelapa deres, kelapa genjah, kemukus, kenanga, kopi arabika, kopi robusta, lada, pala, panili, nilam, tebu, tembakau pada tahun berkenaan

4. Produksi daging

Produksi daging adalah produksi daging sapi, kerbau, kambing, domba, ayam ras, ayam buras, itik, kelinci, burung puyuh, angsa, entog, merpati pada tahun berkenaan

5. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Nilai hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat

6. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*)

Proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. PoU dihitung dengan membandingkan konsumsi energi rata-rata penduduk dengan standar kecukupan energi yang ditetapkan, dan kemudian dinyatakan sebagai persentase.

7. Skor Pola Pangan Harapan

Angka yang menggambarkan keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan berdasarkan komposisi dan jumlah 9 kelompok bahan pangan yang dikonsumsi, dengan skor maksimal 100. Skor PPH dihitung berdasarkan komposisi dan jumlah konsumsi masing-masing kelompok

- pangan, yang dibandingkan dengan pola pangan harapan (PPH) yang telah ditetapkan.
8. Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)
Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Indikator ini digunakan untuk mengukur persentase cadangan pangan Kabupaten/ Kota. Rumus yang digunakan adalah jumlah cadangan pangan pemerintah Kabupaten/ Kota dibagi Jumlah target cadangan pangan pemerintah Kabupaten/ Kota yang ditetapkan dikali 100%.
 9. Produktivitas pertanian per hektar per tahun
Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat produktivitas pertanian. Rumus yang digunakan adalah jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun dibagi luas panen. Satuan hasil yang digunakan ton per hektar per tahun. Jumlah hasil produksi tanaman pangan yang dihitung meliputi padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang hijau, kacang tanah, dan porang.
 10. Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular
Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat penurunan kejadian penyakit hewan menular. Rumus yang digunakan adalah (jumlah kejadian/ kasus penyakit hewan menular tahun berjalan (t) - jumlah kejadian/ kasus hewan menular tahun sebelumnya) dibagi jumlah kejadian/ kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) dikali 100%.
 11. Ketersediaan program pemanfaatan pekarangan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, penurunan prevalensi *stunting* termasuk salah satu indikator yang diukur dalam lingkup kondisi kesehatan guna memastikan Pemerintah Daerah tetap melaksanakan upaya Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* (PPPS) terkonvergen. Salah satu indikator layanan adalah ketersediaan program pemanfaatan pekarangan untuk peningkatan asupan gizi di desa dan kelurahan.

Tabel 4.6.
Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kabupaten Purworejo

No	Indikator	Satuan	Target 2026	Keterangan
Indikator Kinerja Utama (IKU)				
1	Produksi tanaman pangan	Ton/ th	427.107,95	Tujuan dan sasaran

2	Produksi hortikultura	Ton/ th	82.413,56	Tujuan dan sasaran
3	Produksi perkebunan	Ton/ th	39.375,85	Tujuan dan sasaran
4	Produksi daging	Ton/ th	9.839,36	Tujuan dan sasaran
5	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	70,45	Tujuan dan sasaran
6	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	%	11,00	Tujuan
7	Skor Pola Pangan Harapan	Angka	91,70	Sasaran
Indikator Kinerja Kunci (IKK)				
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	75,00	Permendagri No. 18 Tahun 2020
2	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	ton/ ha	6,90	Permendagri No. 18 Tahun 2020
3	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	20,00	Permendagri No. 18 Tahun 2020
4	Ketersediaan program pemanfaatan pekarangan	Desa	7	Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2026 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2025-2029 . Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan prioritas dalam mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah. Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2026 merupakan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) melalui proses pembahasan sebelum menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

5.1. Catatan Penting

Terkait pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2026 masih memiliki catatan-catatan penting sebagai berikut:

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian Dalam Rangka Percepatan Swasembada Pangan tertanggal 4 Februari 2025 yang menginstruksikan kepada Menteri Pertanian untuk mengalihkan Penyuluh Pertanian Aparat Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota kepada Kementerian Pertanian dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Instruksi Presiden ini.
2. Penganekaragaman konsumsi pangan dengan membudayakan pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).
3. Pembaruan data pertanian seperti lahan dan jaringan irigasi untuk memperkuat perencanaan pembangunan pertanian.
4. Mendorong pertanian ramah lingkungan supaya dapat berkontribusi signifikan dalam mengurangi emisi gas rumah kaca.

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2026 sebagai berikut:

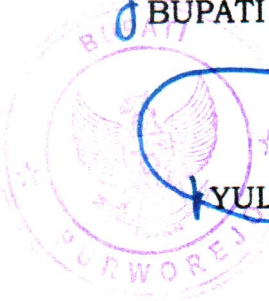
1. Selaras dengan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029.
2. Indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan harus mencerminkan kontribusi terhadap pencapaian sasaran.
3. Responsif dengan isu strategis yang dihadapi.
4. Efektif dan efisien dalam memanfaatkan sumber daya.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Langkah-langkah yang ditempuh dalam upaya pencapaian sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo antara lain sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan secara tepat waktu sesuai jadwal tahapan kegiatan dengan fokus kepada pencapaian sasaran.
2. Meningkatkan koordinasi di daerah maupun pusat terkait penyediaan anggaran dan kegiatan pembangunan pertanian supaya target sasaran bisa tercapai.
3. Pengelolaan risiko strategis dan operasional serta penyesuaian apabila ada perubahan kebijakan atau anggaran.
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menilai progres pencapaian sasaran.

Keberhasilan Rencana Kerja tidak terlepas dari dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, anggaran, sarana dan prasarana yang memadai serta pelaksanaan yang efektif dan efisien supaya sasaran yang sudah ditetapkan dapat tercapai. Rencana Kerja ini dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2026.

BUPATI PURWOREJO,

YULI HASTUTI